

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Salah satu aspek penting dalam reformasi birokrasi adalah penataan manajemen pemerintah pusat dan daerah. Demi terciptanya keberhasilan kinerja pada instansi pemerintah, penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara efektif dan efisien (Noviyana dan Pratolo, 2018).

Penilaian kinerja pada setiap organisasi sangat penting dilakukan khususnya di pemerintahan baik sebagai penilaian individu maupun penilaian keseluruhan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat dan juga sebagai alat ukur penilaian kinerja periode yang lalu untuk di gunakan sebagai dasar penyusunan strategi periode selanjutnya. Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah dituntut untuk memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap terhadap lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas, disamping itu pemerintah juga dituntut untuk melakukan pembagian tugas yang baik.

Keberhasilan suatu organisasi bergantung pada kinerja organisasi itu sendiri, baik organisasi non pemerintah maupun organisasi pemerintah di mana pemerintah bertujuan untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Kondisi ini mendorong

organisasi publik untuk dapat mengelola jasa pelayanan publik secara baik dan bertanggungjawab berdasarkan pada prinsip *value for money* (*effectivity, efficiency, economy*) (Amelia Amran, 2020).

Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan dari kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik (Nasir dan Gunawan, 2019).

Fenomena yang berkaitan kinerja instansi di dalam pemerintah merupakan hal yang rutin terjadi. Fenomena yang terjadi pada Direktorat Keuangan TNI Angkatan Darat (DITKUAD). Rendahnya kinerja yang terjadi pada institusi tersebut dikarenakan masih adanya penyelesaian pekerjaan yang belum optimal, penyelesaian pekerjaan tidak sesuai target dan waktu yang telah ditentukan, tingginya perilaku indisipliner yang dilakukan oleh anggota TNI, tanggungjawab terhadap pekerjaan kurang maksimal.

Rendahnya kinerja institusi juga terkait adanya kesalahan saat penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh staff direktorat keuangan angkatan darat. Adanya indikasi saldo tidak normal pada semester 1 tahun 2021 sebesar Rp. 96.356.961.781, dimana terdapat kesalahan dalam melakukan jurnal sehingga terjadi salah saji yang material terhadap laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan masih lemahnya kinerja organisasi tersebut.

<https://ditkuad.mil.id>

Fenomena lain terjadi pada Instansi POLRI tahun 2017. Pungutan liar serta suap kerap terjadi di instansi kepolisian, Tito Karnavian selaku kapolri menyebutkan tempat-tempat pelayanan yang terindikasi menjadi sarang pungutan liar, seperti tempat pembuatan SIM, STNK, dan BPKB. Maraknya pungutan liar yang dilakukan disatukan pelayanan administrasi polri sehingga menempatkan institusi polri paling memiliki kualitas pelayanan yang buruk sebagai lembaga negara.

Selain itu instansi polri dalam hal mutu pelayanan saluran informasi masih dianggap buruk, saat kontak layanan dihubungi mereka tidak responsif. Dari 10 unit kerja di Polri, hanya 44 persen atau hanya 4 unit kerja yang merespon, sedangkan yanglainnya tak mengangkat telepon.

Korps Bhayangkara menilai Indeks kinerja kepolisian masih memiliki banyakkekurangan, diantaranya pada prinsip akuntabilitas, kualitas dan efektivitas pelayananserta pada prinsip keadilan.

<https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/buruk-polri-di-mata-masyarakat-cmwM>

Fenomena lainnya terjadi pada instansi Komnas HAM. Komnas HAM periode 2012-2017 dinilai masih buruk karena terbengkalainya beberapa kasus pelanggaran HAM yang tidak tuntas sampai pada persoalan diinternal institusi itu sendiri. Kurangnya komitmen organisasi pada diri karyawan menyebabkan muncul banyak masalah internal yang terjadi.

Ketua YLBH, Asfinawati mengatakan, sejak memasuki era reformasi, dalam melakukan penyidikan dan menghentikan pelanggaran HAM seperti mandat awal lembaga itu dibentuk tahun 1993, kinerja Komnas HAM mengalami penurunan. Dalam

perjalanan reformasi dari 1998 hingga saat ini kami menemukan nyaris tidak ada perkembangan berarti dari mandat tersebut.

Sejumlah kasus penyelidikan pelanggaran HAM yang tidak tuntas mengindikasikan buruknya akuntabilitas serta pelayanan yang diberikan, seperti penyelidikan kasus paniai 2014 yang melibatkan TNI-Polri, Pelanggaran HAM disektor agraria, Peristiwa wasior Wamena hingga yang terbaru kasus vaksin palsu.

Pada kesempatan yang sama, aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Khalisa Khalid mengkritik kinerja Komnas HAM dalam penanganan ribuan kasus konflik agraria dan perebutan sumber daya alam yang dilaporkan publik ke lembaga itu. Namun, menurut dia, sampai sekarang nasib penanganan mayoritas kasus tersebut tidak jelas.

<https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/104695/kinerja-komnas-ham-dinilai-buruk>

Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja instansi salah satunya sistem pengendalian internal yang dapat meningkatkan kinerja instansi (Amirudin, Dhanny dan Rafika, 2019). Pengendalian intern pada Pemerintah Pusat dan daerah berpedoman pada PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern sangat penting dalam menunjang perbaikan pengelolaan pemerintah dan merupakan faktor pendukung untuk menciptakan pemerintah yang akuntabel dan transparan sebagai cerminan dari kinerja yang baik (Brejita Mamuaja, 2016).

Menurut PP 60 tahun 2008 bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem pengendalian intern pemerintah meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran - ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keterandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan dipatuhinya kebijakan pimpinan. Penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien. Untuk mewujudkannya dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai tujuan (Chici Claraini, 2017).

Faktor lainnya yang mempengaruhi kinerja instansi adalah komitmen organisasi (Afrizal Tahar, Kunchahyo, 2020). Komitmen organisasi adalah suatu keadaan di mana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu beserta tujuannya dan berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi itu (Cepi Triatna, 2015).

Komitmen organisasi dibuat oleh semua komponen - komponen individual dalam menjalankan operasional pemerintahan. Komitmen tersebut dapat tercipta

apabila pegawai sadar akan hak dan kewajibannya dalam pemerintahan tanpa melihat jabatan dan kedudukannya, karena pencapaian kinerja pemerintah merupakan hasil kerja sama dari semua pegawai (Yuni Lestari, 2016).

Komitmen yang dimiliki oleh pegawai akan berpengaruh terhadap kinerja organisasi karena pegawai yang memiliki tingkat komitmen yang tinggi terhadap organisasi cenderung memiliki sikap keberpihakan, rasa cinta, dan kewajiban yang tinggi terhadap instansi sehingga hal ini akan memotivasi mereka untuk menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepada mereka dengan dewasa secara psikologis dan bertanggung jawab. Semua ini pada gilirannya akan meningkatkan kinerja organisasi (Sukarno, Tinangon dan Tangkuman, 2020).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Amirudin, Dhanny dan Rafika (2019) dengan judul “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah” dan penelitian yang dilakukan oleh Afrizal Tahar dan Kunchahyo (2020) dengan judul "Pengaruh Komitmen Organisasi, Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kompensasi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah"

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Instansi (Studi Pada Direktorat Keuangan Angkatan Darat Bandung)”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Direktorat Keuangan Angkatan Darat Bandung (DITKU-AD)
2. Bagaimana Komitmen Organisasi pada Direktorat Keuangan Angkatan Darat Bandung (DITKU-AD)
3. Bagaimana Kinerja Instansi pada Direktorat Keuangan Angkatan Darat Bandung (DITKU-AD)
4. Seberapa Besar Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kinerja Instansi pada Direktorat Keuangan Angkatan Darat Bandung (DITKU-AD)
5. Seberapa Besar Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Instansi pada Direktorat Keuangan Angkatan Darat Bandung (DITKU-AD)
6. Seberapa Besar Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Komitmen Organisasi Secara Simultan terhadap Kinerja Instansi pada Direktorat Keuangan Angkatan Darat Bandung (DITKU-AD)

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Direktorat Keuangan Angkatan Darat Bandung (DITKU-AD)
2. Untuk mengetahui Komitmen Organisasi pada Direktorat Keuangan Angkatan Darat Bandung (DITKU-AD)
3. Untuk mengetahui Kinerja Instansi pada Direktorat Keuangan Angkatan Darat Bandung (DITKU-AD)
4. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kinerja Instansi pada Direktorat Keuangan Angkatan Darat Bandung (DITKU-AD)
5. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Instansi pada Direktorat Keuangan Angkatan Darat Bandung (DITKU-AD)
6. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Komitmen Organisasi Secara Simultan terhadap Kinerja Instansi pada Direktorat Keuangan Angkatan Darat Bandung (DITKU-AD)

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1. Kegunaan Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan pemahaman penulis dalam bidang akuntansi, terutama dalam bidang kajian

sistem informasi akuntansi. Penelitian ini digunakan untuk membandingkan teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi teori yang telah ada dan sebagai bahan referensi bagi para penelitiselanjutnya.

#### **1.4.2. Kegunaan Praktis**

Adapun kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi penulis untuk menambah wawasan, pengetahuan, serta pengalaman terutama terkait dengan Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Instansi (Studi Pada Direktorat Keuangan Angkatan Darat Bandung)

##### **2. Bagi Instansi**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan bermanfaat bagi Direktorat Keuangan Angkatan Darat Bandung khususnya bagi para pegawainya untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Instansi.

##### **3. Bagi Pendidikan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan dan juga dapat dijadikan sebagai alat pertimbangan, acuan, dan referensi untuk

penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama yang berkaitan dengan KinerjaInstansi.

#### **1.5. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan**

Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang akan di teliti, Maka penulis melakukan penelitian pada Direktorat Keuangan Angkatan Darat Bandung (DITKU-AD). Penulis akan melaksanakan penelitian pada bulan September2021 sampai dengan selesai.